



MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN AKTIVITAS PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN

Ratih Rachmadianti¹, Dianwicakasih Ariefiara², Husnah Nur Laela Ermaya²

UPN Veteran Jakarta, Indonesia

Email: ratih.rachmadianti@upnvj.ac.id, dianwicakasih@upnvj.ac.id,

husnah_ermaya@upnvj.ac.id.

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 15-08-2021

Direvisi : 10-09-2021

Disetujui : 15-09-2021

Kata Kunci:

kepemilikan institusional;
kompetensi dewan komisaris; komite audit;
tax avoidance.

Keywords:

institutional ownership; the competence of the board of commissioners; audit committee; tax avoidance.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kompetensi dewan komisaris, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Objek penelitian ini berupa perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, dengan total sampel sebanyak 38 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji pemilihan estimasi data panel, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa kompetensi dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan pemilik saham institusi tidak dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Selain itu, jumlah anggota komite audit yang sesuai standar tidak dapat memastikan pengawasan yang dilakukan pada manajer sudah efektif.

Abstract:

This study aims to analyze the effect of institutional ownership, the competence of the board of commissioners, and audit committee on tax avoidance with profitability, leverage, and firm size as a controlling variable. The object of this research is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2019 period, with a total sample of 38 companies. This research uses quantitative methods using panel data. The data analysis technique used is the classical assumption test, panel data estimation selection test, multiple linear regression test, and hypothesis testing using a significance of 5%. The results of this study indicate that the competence of the board of commissioners has an effect on tax avoidance, while institutional ownership and the audit

committee have no effect on tax avoidance. This is because institutional shareholders cannot influence the policies made by management. In addition, the number of audit committee members according to the standards cannot ensure that the supervision carried out on managers is effective.

Corresponden author: Ratih Rachmadianti1

Email: ratih.rachmadianti@upnvj.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Di masing-masing negara, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas umum dan mengelola kehidupan bangsa dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak dapat terlepas dari sumber pendanaan. Sumber pendanaan Indonesia terdapat dalam APBN, berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2018 Terkait Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Pasal 1, APBN dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara dengan persetujuan DPR. Pendapatan Negara merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang dianggap untuk penambahan asset yang mencakup dari penerimaan hibah, perpajakan, serta negara bukan pajak. Pajak merupakan komponen yang memiliki peran paling besar bagi pendapatan negara.

Pajak adalah iuran yang wajib dibayar pada negara yang terutang badan maupun individu yang memiliki sifat memaksakan sesuai UU yang ada, selain itu wajib pajak tidak menerima imbalan dengan langsung. Pajak dijadikan aliran pendapatan terpenting untuk negara, dan untuk perusahaan pajak beban yang dapat menurunkan jumlah keuntungan bersih perusahaan. Ketidaksamaan kepentingan diantara pemerintah yang memiliki keinginan agar penerima pajak tinggi serta berlanjut berlawanan pada kepentingan perusahaan yang ingin melakukan pembayaran pajak seminimum mungkin (Darmayasa & Hardika 2011). Untuk meminimalisir besaran pajak yang wajib dibayarkan, wajib pajak umumnya akan melaksanakan manajemen pajak.

Manajemen pajak dibagi jadi 2, yakni penggelapan serta penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah perbuatan yang dilaksanakan guna meminimalkan beban pajak dengan cara resmi. Sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalkan tanggungan pajak secara illegal (Judi Budiman, 2012). *Tax Avoidance* menjadi sangat rumit karena jika dilihat dari sudut pandang lainnya diizinkan sebab mematuhi hukum, namun terdapatnya penghindaran pajak jumlah penerimaan yang didapatkan oleh negara akan menjadikan lebih rendah daripada yang harusnya diterima (Winata, 2014).

Kegiatan *tax avoidance* merupakan hal yang seharusnya diperhatikan fiskus. Praktek penghindaran pajak sudah mendekati tindakan penggelapan pajak, hal tersebut tentulah bisa merugikan untuk negara, sebab negara akan kehilangan pendapatan pajak dengan nilai yang besar dan juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Dikutip dari laporan Global Witness memiliki judul "*Taxing Times for Adaro*" yang diluncurkan hari

Kamis 4 Juli 2019 dan media online Liputan 6, Jaringan Perusahaan Luar Negeri PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dilihat sejak 2009-2017 Adaro lewat satu anak perusahaan Singapura, Coaltrade Services International, sudah diatur seperti itu dan sehingga dia dapat melunasi pajak US\$ 125 juta dolar lebih sedikit dibandingkan yang harusnya dibayar di Indonesia. Dengan melakukan perpindahan dana lebih banyak lewat suaka bebas pajak, Adaro kemungkinan telah melakukan pengurangan tagihan pajak Indonesia yang kemudian merugikan pemerintah Indonesia USD 14 juta setiap tahun sejak tahun 2009 hingga 2017.

Pada laporan keuangan perusahaan Adaro terdapat informasi, nilai total komisi penjualan yang didapatkan Coaltrade menggunakan pajak yang rendah di Singapura bertambah rata-rata tahunannya dari USD 4 juta sebelum 2009 jadi USD 55 juta di 2009-2017. Pada tahun 2008, Adaro juga pernah melakukan pembayaran sebesar USD 33 juta guna menuntaskan sengketa bersama otoritas pajak Indonesia terhadap penyesuaian harga transfer dengan Coaltrade. Selain PT Adaro, kasus lainnya adalah BHP Billiton, raksasa tambang baru-baru ini menerima keputusan penolakan banding atas tagihan pajak Aus \$87 juta atau Rp815 miliar untuk pendapatan antara 2006 dan 2018 terkait dengan penggunaan pusat pemasaran yang kontroversial di Singapura untuk mengurangi tagihan pajak.

Tindakan penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh PT Adaro dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika banyak perusahaan melakukan hal yang serupa, dapat dibayangkan berapa banyak jumlah pendapatan negara yang hilang. Dapat dilihat dari tabel penerimaan pajak negara dan pajak penghasilan negara di kurun waktu tahun 2016 hingga 2019 yang persentasenya mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, namun salah satunya adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 1.

Kontribusi Pendapatan Pajak Terhadap Penerimaan Negara Periode 2016 s/d 2019.

No.	Keterangan	Jumlah Penerimaan Pajak dan Pendapatan Negara (Dalam Triliun Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
1	Penerimaan Pajak	Rp. 1.285	Rp. 1.339,8	Rp. 1.315,91	Rp. 1.545,3
2	Pendapatan Negara	Rp. 1.555,1	Rp. 1.655,8	Rp. 1.942,34	Rp. 1.957,2
	Persentase	82,6%	84,5%	67,7%	78,9%

Sumber : APBN Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

Tabel 2.

Kontribusi Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Periode 2016 s/d 2019.

No.	Keterangan	Jumlah Pajak Penghasilan dan Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
1	Pajak Penghasilan	Rp. 666,2	Rp. 645,6	Rp. 751,49	Rp. 770,29
2	Penerimaan Pajak	Rp. 1.285	Rp. 1.339,8	Rp. 1.315,91	Rp. 1.545,3
	Persentase	51,84%	48,18%	57,10%	49,84%

Sumber : APBN Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

Penghindaran pajak merupakan salah satu aktivitas manajer dalam mengelola

perusahaan, didasari dengan anggapan bahwa pajak akan mengurangi kekayaan perusahaan. Mekanisme pengawasan dari *corporate governance* akan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak membayakan perusahaan. Kejadian pada PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan BHP Billiton membuktikan bahwa GCG belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Jika praktek itu tidak diperhatikan tentulah akan menjadi kendala penerimaan pajak negara. CG sangatlah memiliki peran penting untuk menghubungkan permasalahan penghindaran pajak itu.

Sesuai pemaparan Komite Nasional Kebijakan (KNKG, 2006), GCG merupakan suatu penopang sistem perekonomian pasar. Pelaksanaan CGC bisa menciptakan ikatan kuat tentang kepercayaan yang diserahkan pada perusahaan yang melaksanakannya, sebab bisa mendukung pertumbuhan serta capaian ekonomi yang berkelanjutan. Latar belakang pentingnya CGC pula berdasarkan pada adanya kejadian Enron serta Worldcom di AS.

Pengadaan GCG bisa berjalan efektif sebab diberikan pengaruh oleh adanya struktur organisasi perusahaan. RUPS, dewan komisaris serta direksi adalah bagian organ perusahaan. RUPS merupakan organ perusahaan yang berkontribusi pada *shareholders* pada pengambilan keputusan kebijakan terkait modal yang diinvestasikan pada perusahaan yang mana kebijakan itu haruslah memperhatikan aturan tentang aturan UU dan anggaran dasar yang ada. Pengangkatan anggota dewan komisaris yang dipilih pada perusahaan haruslah individu yang patut dan layak bagi perusahaan. Dewan komisaris merupakan struktur organisasi perusahaan yang memiliki tugas guna melakukan pengontrolan dan menasehati direksi. Dewan komisaris bisa dibentuk melalui komisaris yang bukan pihak terafiliasi dan komisaris terafiliasi. Salah satunya keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris independen yang ada di perusahaan haruslah mempunyai latar belakang pendidikan terkait akuntansi serta keuangan (KNKG, 2006).

Pada pelaksanaannya tugas dewan komisaris diberi bantuan oleh sejumlah komite, komite audit salah satunya. Pembuatan komite audit pada perusahaan bertujuan guna mempermudah dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terkait pembuatan laporan keuangan perusahaan sudah dirancang serta disuguhkan dengan cara lazim selaras pada prinsip akuntansi yang ada, struktur pengawasan internal perusahaan dilaksanakan dengan baik serta benar, penggunaan audit eksternal dan internal dilaksanakan sesuai standart audit yang ada, serta terdapat langkah terhadap temuan hasil audit yang dilakukan manajemen perusahaan (KNKG, 2006).

Mekanisme pelaksanaan GCG bisa dibedakan menjadi 2 mekanisme yakni mekanisme pelaksanaan Tatahan kepemilikan pada jumlah saham yang dimiliki perusahaan adalah suatu mekanisme pemakaian GCG yang berasal dari luar perusahaan. Struktur kepemilikan saham perusahaan yang dipakai pada penelitian merupakan kepemilikan institusional perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan total saham perusahaan yang dimiliki pemilik perusahaan serta kepemilikan perusahaan bukan bank misalnya asuransi, penanaman modal serta lainnya. Terdapatnya kepemilikan institusional dapat menjadikan pengawasan perusahaan yang maksimal sebab penanam modal institusional tidak pasif ketika melakukan pengawasan pada perusahaan. Investor institusional bisa melakukan pengawasan dengan aktif sebab dalam investor institusional ada ahli yang diperintahkan guna melakukan pengawasan, disamping itu investor institusional memiliki kecenderungan melakukan investasi pada jumlah yang banyak dan akhirnya pengawasan investor institusional tentulah

lebih tidak pasif (Winata, 2014).

Penelitian mengenai praktek penghindaran pajak sudah dilaksanakan sejumlah peneliti terdahulu. Menurut Mulyani et al., (2018) dan Ariawan dan Setiawan, (2017) memaparkan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada praktek penghindaran pajak. Berbeda dengan Praditasari dan Setiawan (2017) serta Wijayani (2016) memaparkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif. Sedangkan Sunarsih dan Oktavia (2016) mengatakan kepemilikan institusional tidak signifikan pada penghindaran pajak.

Selanjutnya, penelitian terkait dengan dewan komisaris independen pada penghindaran pajak yang juga dilaksanakan Mulyani et al., (2018) serta Ariawan dan Setiawan (2017). memaparkan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif. Tetapi Praditasari dan Setiawan (2017) memaparkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Penelitian terkait komite audit pada penghindaran pajak yang juga dilaksanakan Mulyani et al., (2018) serta Sunarsih dan Oktaviani (2016) menyebutkan komite audit berpengaruh signifikan positif. Sedangkan Praditasari dan Setiawan (2017) memaparkan komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena diatas, untuk itu peneliti akan melakukan pengujian apakah kepemilikan institusional, kompetensi dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh variabel kontrol berupa profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Penelitian dilakukan dengan merujuk pada penelitian Mulyani et al., (2018) dengan beberapa pembaharuan. Pertama, pengukuran *tax avoidance* pada penelitian Mulyani et al., (2018) menggunakan CETR, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan BTD. Kedua, pengukuran dewan komisaris menggunakan kompetensi dewan komisaris. Ketiga, pada penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan, profitabilitas, serta *leverage* sebagai variabel kontrol.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), disebut metode kuantitatif karena penelitian menggunakan data berupa angka dan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi pada penelitian ini adalah 44 perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 sampai dengan 2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang dipilih berdasarkan perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit secara berturut pada periode 2015-2019 serta menyediakan informasi yang digunakan pada variabel dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 38 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian.

Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ialah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance yang diketahui menggunakan Total Book Tax Defference. BTD dapat

dipakai sebagai pengukur besaran perbedaan keuntungan akuntansi dengan laba fiskal, dimana perbedaan tersebut akan mencerminkan adanya indikasi tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan jika jumlah perbedaannya bertambah tinggi. Penggunaan BTD sebagai alat ukur perilaku penghindaran pajak telah dilaksanakan pada penelitian Pohan T Hotman, (2009), Wibawa et al., (2016), Tampubolon dan Kartikaningdyah (2016). BTD bisa diketahui secara menggunakan rumus seperti dibawah ini (Fadhila, 2017).

$$BTD = \frac{Pre\ Tax\ Book\ Income - Taxable\ Income}{Total\ Asset}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan jumlah saham yang dimiliki institusi dibagikan dengan banyaknya saham yang diedarkan (Helmina & Hidayah, 2017).

$$Kepemilikan\ Institusional = \frac{Jumlah\ Saham\ Institusional}{Jumlah\ Saham\ Beredar} \times 100\%$$

3. Kompetensi Dewan Komisaris

Berdasarkan hal tersebut, maka kemampuan dewan komisaris independen diketahui secara menghitung persentase jumlah dewan komisaris yang memiliki latar belakang akuntansi terhadap jumlah anggota dewan komisaris.

Kompetensi Dewan Komisaris

$$= \frac{Jumlah\ dewan\ komisaris\ yang\ memiliki\ latar\ belakang\ akuntansi\ dan\ bisnis}{Jumlah\ Anggota\ Dewan\ Komisaris} \times 100$$

4. Komite Audit

Ukuran komite audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit secara keseluruhan dalam perusahaan (Prastiwi, 2017), sehingga pengukuran komite audit dapat dihitung dengan sebagai berikut.

$$Komite\ Audit = Jumlah\ Anggota\ Komite\ Audit$$

5. Profitabilitas

Pada penelitian profitabilitas sebagai variabel kontrol diketahui memakai ROA yang dapat diukur secara membandingkan keuntungan bersih dengan total kekayaan (Halim & Hanafi, 2016).

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

6. Leverage

Merupakan variabel kontrol pada penelitian *leverage* dihitung menggunakan DAR, dimana DAR adalah rasio perbandingan antara jumlah utang perusahaan dan total kekayaan perusahaan (Kasmir, 2010).

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah indikator yang menggambarkan besarnya kemampuan financial perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan log total aktiva.

$$\text{Firm Size} = \text{Ln total assets}$$

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan STATA v.16. Adapun model regresi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

$$\text{TA}_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot \text{KI}_{it} + \beta_2 \cdot \text{KDK}_{it} + \beta_3 \cdot \text{KA}_{it} + \beta_4 \cdot \text{ROA}_{it} + \beta_5 \cdot \text{LEV}_{it} + \beta_6 \cdot \text{SIZE}_{it} + \text{eit}$$

eterangan :

TA _{it}	: Tax Avoidance, Book Tax Defference (BTD perusahaan i di tahun t
	: Konstanta
β ₁ -β ₆	: Koefisien regresi
KI _{it}	: Kepemilikan Institusional perusahaan i di tahun t
KDK _{it}	: Kompetensi Dewan Komisaris perusahaan i di tahun t
KA _{it}	: Komite Audit perusahaan i di tahun t
ROA _{it}	: ROA perusahaan i di tahun t
EV _{it}	: <i>Leverage</i> perusahaan i di tahun t
IZE _{it}	: Ukuran perusahaan i di tahun t
	: Error

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan penjelasan secara umum atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun hasil dari statistik deskriptif yang diolah menggunakan STATA v.16 pada penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
TA	190	-0,06	,2492253	-0,7	0,59
KI	190	,7134737	,1942603	0,22	1,16
KDK	190	,4943684	,2352042	0,05	0,95
UKA	190	3,155947	,2619198	2,23	3,72
PRO	190	0,0155263	,2683725	-0,71	0,68
LEV	190	,4728947	,2717892	-0,23	1,19

SIZE	190	23,15684	3,87454	13,38	33,3
------	-----	----------	---------	-------	------

Catatan: LEV: *Leverage*, KI: Kepemilikan Institusional PRO: Profitabilitas, UKA: Ukuran Komite Audit, KDK: Kompetensi Dewan Komisaris, SIZE: Ukuran Perusahaan.

Sumber: Output STATA v.16

Hasil pada data tabel statistik deskriptif merupakan data setelah transformasi, dimana memperoleh informasi sebagai berikut:

Tax avoidance yang diukur dengan *Book Tax Difference* (BTD) mencerminkan seberapa besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata sebesar -0,06 atau -6%. Sehingga, dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sampel masih tergolong rendah dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.. Kemudian, Kepemilikan institusional merepresentasikan besaran saham perusahaan yang dipunyai oleh kepemilikan institusi, menunjukkan rata-rata kepemilikan institusional dalam perusahaan sampel sebesar 0.7134737 yang dapat dikatakan bahwa rata-rata kepemilikan saham pihak institusi dalam perusahaan cukup besar. Sedangkan untuk nilai terendah sebesar 0.22 atau setara dengan 29% dan nilai tertinggi nilainya sebesar 1.16 atau setara dengan 99% kepemilikan institusional. Selanjutnya, Kompetensi dewan komisaris menunjukkan sejauh mana latar belakang pendidikan dewan komisaris mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dewan komisaris dalam fungsi pengawasan terhadap manajemen selaku pengelola perusahaan, menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi dewan komisaris sebesar 0.4943684 atau 49%, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki dewan komisaris yang berkompeten atau memiliki latar belakang akuntansi dan bisnis. Kemudian untuk kompetensi terendah sebesar 0,05 atau 5% dan tertinggi ialah sebesar 0.95 atau 95%. Berikutnya, Komite audit menunjukkan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh komite audit selaku pihak yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan, menunjukkan bahwa rata-rata ukuran komite audit sebesar 3.155947 yang dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki 3 anggota komite audit. Kemudian untuk ukuran komite audit terendah sebesar 2,23 atau 2 anggota komite audit dan tertinggi ialah sebesar 3,72 atau 5 anggota komite audit.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas sebesar -0.0155263 atau -0,1%. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata sampel perusahaan memiliki tingkat laba bersih sebesar -0,1% dari total aset. Kemudian untuk tingkat profitabilitas terendah sebesar -0,71 atau -71% dan tingkat profitabilitas tertinggi ialah sebesar 0,68 atau 0,68%. *Leverage* menunjukkan tingkat sumber pendanaan kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari hutang, menunjukkan bahwa rata-rata *leverage* sebesar 0.4728947. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki sumber pendanaan yang berasal dari hutang sebanyak 47,28% dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk tingkat *leverage* terendah sebesar -0,23 atau -71% dan tertinggi ialah sebesar 1,19 atau 0,68%. Ukuran perusahaan ialah pengklasifikasian perusahaan berdasarkan indikator tertentu, dalam penelitian ini pengklasifikasian menggunakan indikator total aset perusahaan, menunjukkan hasil bahwa rata-rata ukuran perusahaan yang dihitung dengan menggunakan logaritma natural (LN) dari total aset yakni sebesar 23,15684. Dengan demikian, dapat dikatakan rata-rata perusahaan sampel memiliki

nilai aset yang tinggi dan termasuk dalam kategori perusahaan besar. Untuk nilai terendah sebesar 13,38 dan tertinggi sebesar 33,3.

Pembahasan

Untuk mengetahui apakah pengaruh yang kepemilikan institusional, kompetensi dewan komisaris dan komite audit pada *tax avoidance* penelitian ini menggunakan pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan *fixed effect model* sebagai model estimasi data panel. Berdasarkan hasil dari uji regresi pada penelitian menggunakan *fixed effect model*. Untuk menentukan adanya pengaruh dari masing-masing variabel pada penelitian ini menggunakan tiga tingkatan signifikansi berbeda yaitu 5%. Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan program STATA v.16:

Tabel 4. Output olah data Uji Regrei setelah outlier dan transformasi

Variabel	Regression Model				
	Random Effect Model			Prediksi	Kesimpulan
	Coeffiients	t	Prob.	Tanda Hipotesis	
KI	0,2241284	1,38	0,169	H ₁ : +/-	H ₁ ditolak
KDK	0,3027583	2,81	0,006*	H ₂ : +/-	H ₂ diterima
UKA	-0,0187691	-0,53	0,596	H ₃ : +/-	H ₃ ditolak
PRO	0,8675162	12,95	0,000*		
LEV	-0,0152247	-0,17	0,863		
SIZE	-0,0058818	-1,32	0,190		
_cons	-0,1548746	-0,78	0,437		
Number of Obs	190				
R-squared Overall	0.3377				
Prob (F-Statistic)	0.0000				

Sumber: Output STATA v.16

Pada pengujian hipotesis pertama, bertujuan untuk membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil tersebut, maka hipotesis satu (H₁) ditolak. Kepemilikan institusional merupakan sistem pengendalian *corporate governance* yang berasal dari eksternal perusahaan yang diharapkan dapat menjadi pengawas bagi manajer perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pemilik saham institusional merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang tidak dapat mempengaruhi kebijakan manajemen yang memiliki keterkaitan dengan tindakan *tax avoidance*.

Berkaitan dengan teori agensi, bahwa *principal* memberikan tanggung jawab kepada agen untuk melakukan tugas tertentu demi kepentingan *principal* (Jensen and Meckling, 1976). Pendelegasian wewenang ini berupa tanggung jawab pengelolaan perusahaan yang diberikan kepada manajemen. Akan tetapi masih banyak manajemen yang bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*. Sehingga, dapat terjadi konflik kepentingan antara pemilik saham dengan manajemen. Tindakan oportunistik manajemen dimana salah satu contohnya ialah melakukan penghindaran pajak dapat berdampak negatif bagi perusahaan, salah satunya jika perusahaan dilakukan pemeriksaan oleh DJP dan dapat menarik perhatian pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia et al., (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional belum memiliki peran penting dalam mengawasi manajer agar tidak bersikap oportunistik. Sandy & Lukviarman (2015) dan Fitria (2018) juga menyatakan hal serupa, bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada pengujian hipotesis kedua, bertujuan untuk membuktikan kompetensi dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa kompetensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil tersebut, maka hipotesis dua (H_2) diterima. Kompetensi dewan komisaris dapat diartikan sebagai kemampuan, pengetahuan dan latar belakang pendidikan dewan komisaris, sehingga dewan komisaris dapat memiliki kemampuan untuk memahami operasi bisnis perusahaan. Selain itu kompetensi dewan komisaris juga akan berdampak pada efektivitas fungsi pengawasan, hal ini karena anggota dewan komisaris yang memiliki kompetensi dalam memahami laporan keuangan perusahaan akan mempermudah dewan komisaris dalam mengevaluasi kinerja manajer perusahaan.

Berkaitan dengan teori agensi, dimana manajer sebagai agen yang diberikan wewenang oleh *principal* sehingga harus bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Dewan komisaris bertindak selaku pihak yang mewakilkan pemilik perusahaan atau *principal* dalam melakukan pengawasan kepada manajemen. Oleh karena itu, dapat dikatakan hasil penelitian ini sudah sejalan dengan teori agensi. Dimana dewan komisaris yang memiliki kompetensi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajer. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Praptitorini (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas dewan komisaris yang terdiri dari pengalaman dan latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pada pengujian hipotesis ketiga, bertujuan untuk membuktikan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil tersebut, maka hipotesis tiga (H_3) ditolak. Komite audit dibentuk dengan tujuan membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya fungsi komite audit masih belum efektif.

Berkaitan dengan teori agensi, dimana *principal* melimpahkan wewenang kepada manajer selaku pihak yang mengelola perusahaan dengan memperhatikan kepentingan

principal (Jensen & Meckling, 1976). Komite audit memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kepada manajer. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi. Dimana komite audit yang seharusnya dapat membantu meningkatkan fungsi pengawasan, akan tetapi justru tidak memberikan pengaruh atau dengan kata lain tidak memiliki dampak pada fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh dewan komisaris kepada manajemen. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tingkat kompetensi komite audit, aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit belum maksimal, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan OJK. No.55/PJOK.04/2015 komite audit berjumlah paling sedikit sebanyak tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan. Rata-rata jumlah anggota komite audit pada perusahaan tambang adalah 3,155947 atau sebanyak tiga orang anggota. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan OJK, sehingga unsur *corporate governance* sudah dipenuhi. Akan tetapi, jumlah anggota komite audit tidak mampu menunjukkan tingkat efektivitas pengawasan kepada manajer. Hasil penelitian ini sejalan dengan Oktavia et al., (2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ardianti (2019) juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan komite audit sebagai instrumen pengawasan kebijakan dan regulasi keuangan tidak mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan uji hipotesis yang sudah dilakukan, maka diperoleh hasil yakni:

1. Pada variabel kepemilikan institusional, berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan artinya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dalam jumlah besar maupun kecil tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.
2. Kompetensi dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dimana tingkat kompetensi atau kemampuan dewan komisaris dapat mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan dan evaluasi dewan komisaris terhadap kinerja manajemen perusahaan melalui laporan keuangan.
3. Selanjutnya pada variabel komite audit, berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan ukuran komite audit tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa besar atau kecilnya ukuran komite audit dalam perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Namun, dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yakni setelah dilakukan pengujian dalam penelitian ini, ternyata terdapat dua variabel independen yang tidak terbukti dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional dan komite audit. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit ternyata belum mampu mengukur tingkat pengawasan kepada aktivitas manajer, karena ukuran komite audit ini telah terdapat standar jumlah minimum anggota komite audit dari OJK.

Dari keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, untuk itu adapun saran yang dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya ialah, ukuran komite audit belum mampu menunjukkan efektivitas pengawasan kepada manajer. Maka penelitian selanjutnya disarankan menggunakan indikator kompetensi dan aktivitas komite audit sebagai ukuran variabel komite audit.

BIBLIOGRAFI

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amelia, M. V., et al., (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Proceeding of Management ISSN : 2355-9357*, 4(2), 1510–1515.
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan *Leverge* Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Arieftiara, D., et al., (2020). Contingent fit between business strategies and environmental uncertainty: The impact on corporate tax avoidance in Indonesia. *Meditari Accountancy Research*, 28(1), 139–167. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2018-0338>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (11th ed.). Salemba Empat.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- Cadbury Committee. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance* (1st ed.). Gee.
- Chytis, E., et al., (2019). The relationship between tax avoidance, company characteristics and corporate governance: Evidence from Greece. *Corporate Ownership and Control*, 16(4), 77–86. <https://doi.org/10.22495/cocv16i4art7>
- Daniri, M. A. (2014). *Lead By GCG* (D. Edward (ed.)). Gagasan Bisnis Indonesia.

- Darmayasa, N., & Hardika, N. S. (2011). Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(3), 162–169.
- DDTCNews. 2020. "Banding BHP Ditolak, ATO Menang Rp815 Miliar". Diakses 1 Oktober 2020, dari <https://news.ddtc.co.id/banding-bhp-ditolak-ato-menang-rp815-miliar-19497>
- Debby, J. F., et al., (2014). Good Corporate Governance, Company's Characteristics and Firm's Value: Empirical Study of Listed Banking on Indonesian Stock Exchange. *GSTF Journal on Business Review (GBR)*, 3(4).
- Dyreng, S. D., et al., (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Egbunike, F. C., et al., (2021). *Internal Corporate Governance Mechanisms and Corporate Tax Avoidance in Nigeria: A Quantile Regression Approach*. January. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2021.v16.i01.p02>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Fadhila, N. S. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1803–1820. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p04>
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Universitas Negeri Padang*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 94–104. <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/4315>
- Ghozali, H. I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Hanafi, M. M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (5th ed.). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance (Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis)* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

- Helmina, M. R. A., & Hidayah, R. (2017). Pengaruh Institutional Ownership, Collateralizable Assets, Debt to Total Assets, Firm Size Terhadap Dividend Payout Ratio. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 3(1), 24–32. <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/jieb/article/view/49>
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. Van. (1991). *Accounting theory* (5th ed.). McGraw-Hill Education, 1991.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19–26.
- Hoseini, M., et al., (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Irianto, B. S., et al., (2017). The Influence of Profitability , *Leverage* , Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms : Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644.
- Jensen, M. C. M., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Human Relations*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Judi Budiman, S. (2012). Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VX*, 15, 1–22.
- Karima, N. (2014). Naila Karima Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 219. *Widya Warta*, 2, 219–230.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (7th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Kessler, J. (2004). Tax Avoidance Purpose and Section 741 of taxes Act 1988. *British Tax Review*.
- KNKG, K. N. K. G. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, *Leverage*, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kusumastuti, S., et al., (2007). Pengaruh Board Diversity Pada Nilai Perusahaan Dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 88–98.

<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p15>.

Liputan 6. 2019." Kejar Penghindaran Pajak, Sri Mulyani Dalam Jejak Adaro"
Diakses 1 Oktober 2020, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4007855/kejar-penghindaran-pajak-sri-mulyani-dalami-rekam-jejak-adaro>.

Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 525–539.

Merks, P. (2007). Categorizing international tax planning. *Fundamentals of International Tax Planning. IBFD*, 66–69.

Mulyani, S., Wijayanti, A., & Endang, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>

Munawir, S. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty.

Muntoro, K. R. (2006). *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. Lembaga Manajemen FEB UI. [http://www.lmfeui.com/data/mui_Membangun Dewan Komisaris yang Efektif_Ronny K Muntoro.pdf](http://www.lmfeui.com/data/mui_Membangun_Dewan_Komisaris_yang_Efektif_Ronny_K_Muntoro.pdf)

Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>

Novianti, D. R., et al., (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Equity*, 21(2), 116. <https://doi.org/10.34209/equ.v21i2.637>

Nuraina, E. (2012). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.26740/jaj.v4n1.p51-70>

Oktavia, V., et al., (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance | Hal 143-151. *Journal Revenue*, 01(02), 143–151.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.

Otoritas Jasa Keuangan, (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*.

- Pohan T Hotman. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akruwal Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113–135.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229–1258.
- Praptitorini, M. D. (2018). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 9(1), 66–77.
- Prastiwi, D. (2017). Does Corporate Governance Moderate the Effect of Earnings Management on Tax Aggressiveness. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 108(SoSHEC 2017), 8–13. <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.2>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 1–11.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>
- Sartono, R. A. (2008). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (4th ed.). BPFE.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory 7th edition* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Siahaan, H. (2004). Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimalkan Nilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Moneter*, 7(1).
- Siregar, S. V. N. ., & Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Simposium Nasional Akuntansi VIII, September*, 475–490.
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). *Factors Influencing Tax Avoidance*. 73, 238–243. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52>
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 923–932.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax. *Etikonomi*, 15(October), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi, VIII*, 136–146.
- Tampubolon, M. T., & Kartikaningdyah, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Book Tax Differences. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(1), 52–59.
- Tandean, V. A. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period. *Asian Journal of Accounting Research*, 1, 28–38.
- Waluyo. (2017). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidane : Empirical Study Of The Indonesian. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 02(02).
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–9.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5 (ed.)). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesiafile:///E:/SMT 6/Referensi Jurnal/tax avoidance/chen2010 kepemilikan keluarga.pdf (Studi Empiris Perusahaan Manufaktu. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.
- Witness, Global. 2019. Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia.
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313–332. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>